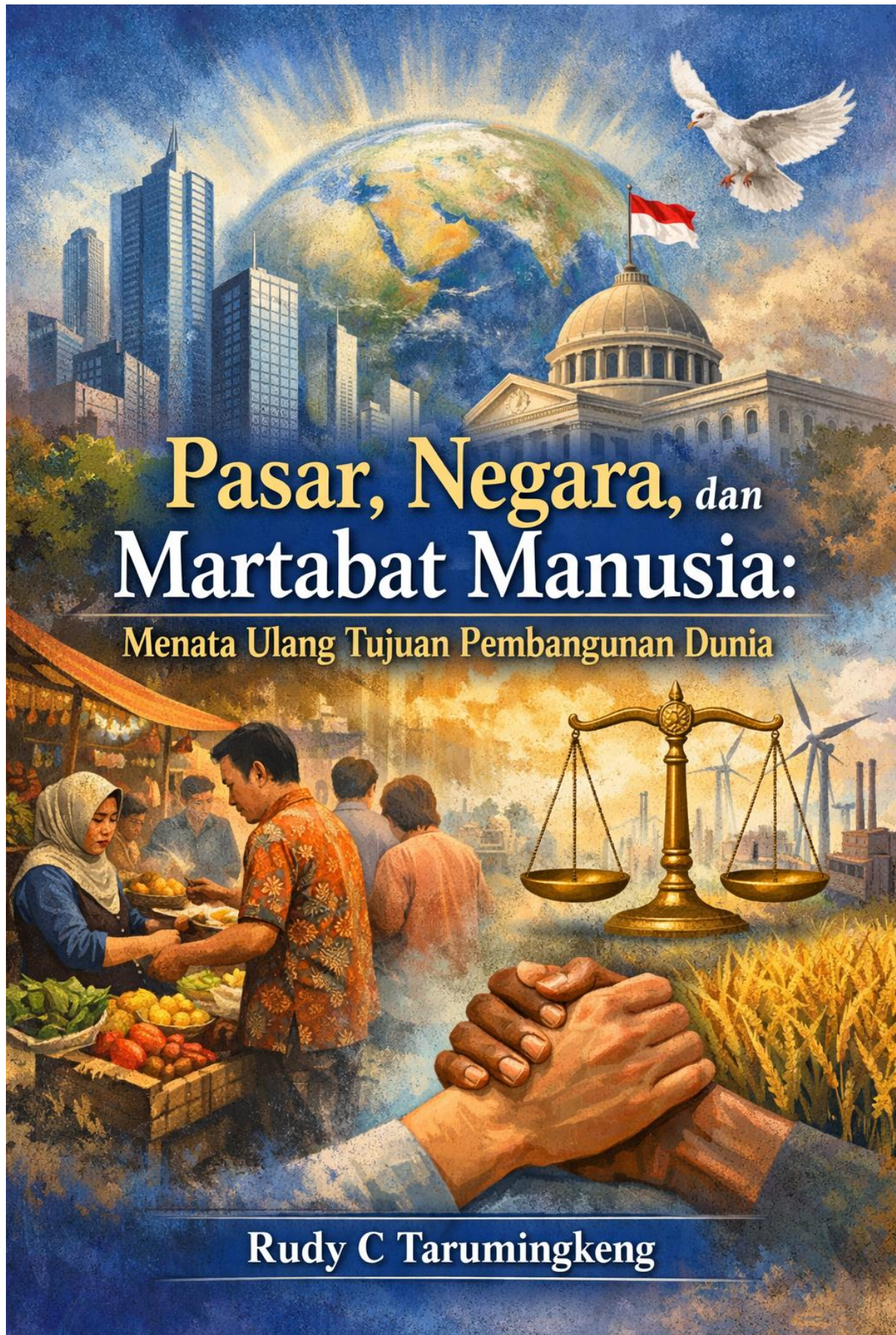




Pasar, Negara, dan Martabat Manusia:

Menata Ulang Tujuan Pembangunan Dunia

Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Pasar, Negara, dan Martabat Manusia:
Menata Ulang Tujuan Pembangunan Dunia*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

13 April 2026

PASAR, NEGARA, DAN MARTABAT MANUSIA: MENATA ULANG TUJUAN PEMBANGUNAN DUNIA

Abstrak

Makalah ini membahas kebutuhan mendesak untuk menata ulang tujuan pembangunan dunia di tengah perlambatan pertumbuhan, krisis utang, ketimpangan, kerentanan kerja, dan tekanan iklim yang semakin berat. Argumen utama makalah ini adalah bahwa pasar dan negara sama-sama penting, tetapi keduanya harus ditempatkan di bawah orientasi etis yang lebih tinggi, yaitu martabat manusia. Pasar diperlukan untuk inovasi, efisiensi, dan koordinasi ekonomi; negara diperlukan untuk koreksi kegagalan pasar, penyediaan barang publik, perlindungan sosial, dan penjagaan keadilan. Namun ketika pasar diperlakukan sebagai tujuan, pembangunan tereduksi menjadi akumulasi; dan ketika negara diperlakukan sebagai alat kekuasaan semata, pembangunan berubah menjadi administrasi tanpa jiwa. Karena itu, pembangunan perlu dirumuskan kembali sebagai proses memperluas kemampuan manusia untuk hidup layak, aman, sehat, produktif, dan bermakna. Dengan memadukan perspektif ekonomi politik, human development, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan, makalah ini menawarkan kerangka pembangunan baru yang menyeimbangkan efisiensi pasar, kapasitas negara, dan prioritas moral terhadap manusia serta planet.

Kerangka tersebut menuntut perubahan dalam ukuran kemajuan, desain kebijakan sosial, tata kelola pasar tenaga kerja, pembiayaan pembangunan, transisi hijau, serta arsitektur ekonomi global. Di sini, tujuan akhir pembangunan bukanlah semata pertumbuhan Produk Domestik Bruto, melainkan terciptanya masyarakat yang adil, tangguh, inklusif, dan memuliakan manusia. Temuan ini relevan bagi dunia secara umum dan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang sedang mencari keseimbangan antara daya saing, pemerataan, dan keberlanjutan. Data terbaru menunjukkan bahwa hanya 35 persen target SDGs yang berada di jalur atau menunjukkan kemajuan moderat, sementara pembiayaan SDG menghadapi kesenjangan tahunan sekitar US\$4 triliun; fakta ini menegaskan bahwa krisis pembangunan hari ini bukan hanya krisis sumber daya, melainkan juga krisis orientasi.

Kata kunci: *pasar, negara, martabat manusia, pembangunan, human development, keadilan sosial, SDGs, ketimpangan, perlindungan sosial, ekonomi politik*

Pasar, Negara, dan Martabat Manusia: Menata Ulang Tujuan Pembangunan Dunia

Pendahuluan

Sejak akhir abad ke-20, dunia didorong oleh keyakinan bahwa liberalisasi pasar, globalisasi perdagangan, dan integrasi keuangan akan menghasilkan kemakmuran yang meluas. Dalam banyak hal, keyakinan ini tidak sepenuhnya keliru. Perdagangan yang lebih terbuka mempercepat difusi teknologi, pasar yang lebih luas menciptakan peluang produksi, dan kompetisi mendorong efisiensi. Namun pengalaman beberapa dekade terakhir juga menunjukkan sisi lain yang tidak dapat diabaikan: pertumbuhan tidak otomatis berarti pemerataan; keterhubungan global

tidak otomatis berarti ketahanan; dan inovasi tidak otomatis berarti kemajuan manusia.

Kini, setelah pandemi, guncangan geopolitik, kenaikan biaya hidup, tekanan iklim, dan fragmentasi perdagangan, dunia menghadapi sebuah pertanyaan mendasar: untuk siapa pembangunan itu dijalankan? IMF pada April 2025 menekankan bahwa pertumbuhan global diproyeksikan melemah di tengah ketegangan dagang, ketidakpastian kebijakan, dan risiko pengetatan kondisi keuangan; sementara laporan SDGs 2025 menunjukkan kemajuan global jauh dari memadai untuk mencapai Agenda 2030. Pada saat yang sama, Bank Dunia memperkirakan 622 juta orang masih akan hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2030, dan sekitar 3,4 miliar orang kemungkinan hidup di bawah US\$6,85 per hari. ([IMF](#))

Di sinilah tema pasar, negara, dan martabat manusia menjadi sangat penting. Pasar dan negara bukan dua kutub yang harus dipertentangkan secara ideologis, melainkan dua institusi yang harus diatur secara normatif. Pasar tanpa etika dapat mengkomodifikasi manusia. Negara tanpa batas dapat menindas manusia. Karena itu, pembangunan yang sehat bukan pembangunan yang "pro-pasar" atau "pro-negara" secara mutlak, melainkan pembangunan yang pro-manusia.

Makalah ini berangkat dari tesis bahwa tujuan pembangunan dunia harus dirumuskan ulang. Titik beratnya bukan lagi sekadar pada seberapa besar ekonomi bertumbuh, melainkan pada apakah manusia sungguh hidup lebih bermartabat. Martabat di sini bukan istilah sentimental. Ia berarti manusia tidak diperlakukan hanya sebagai faktor produksi, angka statistik, atau objek administrasi. Manusia adalah subjek moral yang memiliki hak, aspirasi, kebutuhan, dan kemampuan untuk membentuk kehidupannya sendiri.

Krisis Orientasi dalam Pembangunan Dunia

Krisis pembangunan dunia hari ini sering dibaca sebagai krisis pertumbuhan, krisis fiskal, atau krisis iklim. Semua itu benar, tetapi belum menyentuh akar terdalamnya. Yang juga sedang terjadi adalah krisis orientasi: pembangunan terlalu lama diukur oleh output ekonomi, terlalu sedikit oleh kualitas hidup, distribusi kesempatan, keamanan sosial, dan kapasitas manusia untuk berkembang.

Laporan SDGs 2025 menunjukkan gambaran yang keras. Satu dekade setelah adopsi Agenda 2030, hanya 35 persen target SDG yang berada di jalur atau menunjukkan kemajuan moderat. Konflik, perubahan iklim, ketimpangan yang naik, dan pembiayaan yang tidak memadai terus menahan laju pencapaian. Di sektor-sektor dasar, tantangannya sangat besar: 2,2 miliar orang masih tidak memiliki akses air minum yang dikelola dengan aman, 3,4 miliar tanpa sanitasi yang dikelola dengan aman, 2,1 miliar tanpa akses ke solusi memasak bersih, dan 2,6 miliar orang masih offline pada 2024.

Di bidang ketenagakerjaan, paradoksnya semakin tampak. Laporan SDG 2025 mencatat pengangguran global turun ke 5 persen pada 2024, bahkan disebut terendah secara historis. Namun di saat yang sama, 57,8 persen pekerja dunia masih berada dalam pekerjaan informal pada 2024. ILO juga menekankan bahwa pemulihan pasar kerja global berlangsung di tengah tingginya pengangguran kaum muda, kesenjangan gender, dan kembalinya kerja informal serta working poverty ke tingkat pra-pandemi di banyak tempat. Artinya, pekerjaan memang ada, tetapi "good jobs" masih kurang.

Kemiskinan global pun menunjukkan wajah yang lebih kompleks. Bank Dunia menegaskan bahwa jika pertumbuhan tidak dipercepat dan tidak dibuat lebih inklusif, penghapusan kemiskinan ekstrem akan memerlukan waktu sangat lama, bahkan lebih dari satu abad untuk mengangkat orang-orang di atas garis US\$6,85 per hari. Ini memperlihatkan bahwa persoalannya bukan sekadar kurangnya pertumbuhan, tetapi juga mutu

pertumbuhan: siapa yang menikmati hasilnya, siapa yang tertinggal, dan seberapa tahan masyarakat terhadap guncangan. ([World Bank](#))

Di sisi fiskal, banyak negara berkembang terjepit oleh beban utang. Bank Dunia melaporkan negara-negara berkembang membayar rekor US\$1,4 triliun untuk melayani utang luar negeri pada 2023, sementara biaya bunga melonjak ke level tertinggi dalam dua dekade. UNCTAD menambahkan bahwa utang eksternal negara berkembang mencapai rekor US\$11,4 triliun pada 2023, dengan dua pertiga negara berkembang menghadapi masalah ketika biaya pembayaran melampaui kapasitas mereka. Dalam konteks seperti ini, pemerintah dipaksa memilih antara melayani kreditur atau melayani warga. ([World Bank](#))

Krisis iklim memperberat semuanya. UNEP mencatat arus pembiayaan adaptasi publik internasional ke negara berkembang memang naik dari US\$22 miliar pada 2021 menjadi US\$28 miliar pada 2022, tetapi kesenjangan pembiayaan adaptasi tetap diperkirakan sebesar US\$187–359 miliar per tahun. Dengan kata lain, dunia tahu risiko iklim meningkat, tetapi sistem pembiayaannya belum bergerak cukup cepat. Akibatnya, kelompok yang paling rentan menjadi pihak yang paling dahulu dan paling keras menanggung dampaknya. ([UNEP - UN Environment Programme](#))

Dari gambaran ini tampak bahwa pembangunan dunia tidak kekurangan slogan, tetapi kekurangan keselarasan institusional dan moral. Dunia telah menghasilkan lebih banyak kekayaan, tetapi belum cukup berhasil mengonversinya menjadi keamanan sosial, daya tahan ekologis, dan peluang yang adil. Karena itu, perdebatan tentang pasar dan negara harus dipindahkan dari ideologi ke pertanyaan normatif: bagaimana keduanya melayani martabat manusia?

Pasar: Kekuatan Besar, tetapi Bukan Kompas Moral

Pasar adalah salah satu institusi paling produktif dalam sejarah manusia. Ia memungkinkan jutaan keputusan terkoordinasi tanpa komando tunggal.

Harga memberi sinyal kelangkaan; kompetisi mendorong efisiensi; keuntungan memberi insentif inovasi. Dari sudut ini, pasar tidak layak dipandang sebagai musuh pembangunan. Negara-negara yang berhasil keluar dari kemiskinan dalam skala besar hampir selalu memanfaatkan dinamika pasar, perdagangan, investasi, dan kewirausahaan.

Tetapi pasar mempunyai keterbatasan mendasar. Pertama, pasar mengukur daya beli, bukan martabat. Ia merespons preferensi yang didukung uang, bukan kebutuhan yang didukung klaim moral. Seorang bayi yang membutuhkan gizi, seorang lansia yang membutuhkan perawatan, atau seorang petani kecil yang kehilangan panen karena iklim, tidak otomatis memperoleh perlindungan hanya karena kebutuhan mereka sangat nyata. Bila tidak ada daya beli yang cukup, pasar diam.

Kedua, pasar cenderung mengabaikan eksternalitas. Keuntungan perusahaan dapat meningkat sambil biaya sesungguhnya dipindahkan ke masyarakat dalam bentuk polusi, kerusakan kesehatan, ketidakamanan kerja, atau eksploitasi sumber daya alam. Dalam teori ekonomi, ini disebut market failure. Dalam bahasa moral, ini berarti laba privat dibangun di atas beban sosial.

Ketiga, pasar cenderung menghasilkan konsentrasi bila tidak diatur. Modal yang kuat membeli teknologi yang lebih baik, teknologi meningkatkan produktivitas, produktivitas memperbesar pangsa pasar, dan pangsa pasar memperbesar kemampuan mengakuisisi pesaing. Tanpa kebijakan persaingan, regulasi platform, dan perlindungan pekerja, pasar modern dapat berubah menjadi arena di mana yang besar semakin besar dan yang lemah semakin tergencet.

Di sinilah Karl Polanyi tetap relevan. Dalam *The Great Transformation*, ia menunjukkan bahwa ketika masyarakat dipaksa tunduk pada logika pasar yang meluas, muncullah "gerakan tandingan" sosial dan politik. Tanah, tenaga kerja, dan uang bukan komoditas biasa; memperlakukan ketiganya seolah-olah sekadar objek dagang akan menimbulkan kerusakan sosial.

Gagasan ini penting bagi zaman kini. Tenaga kerja platform, data pribadi, layanan kesehatan, pendidikan, dan bahkan perhatian manusia makin mudah dikomodifikasi. Pertanyaannya bukan apakah pasar boleh beroperasi, tetapi di mana batas-batas moralnya.

Bayangkan seorang pengemudi platform di kota besar. Secara formal ia dianggap "mitra", bukan pekerja. Ia bebas memilih waktu kerja, tetapi algoritme menentukan pendapatan dan insentifnya. Ia masuk ke ekonomi pasar digital, tetapi tanpa jaminan sosial yang memadai, tanpa kepastian penghasilan, dan tanpa posisi tawar setara. Dari sudut efisiensi, sistem ini tampak fleksibel. Dari sudut martabat, sistem ini menyisakan problem: siapa yang menanggung risiko? Siapa yang menikmati surplus?

Dalam konteks itulah pasar perlu dipahami sebagai instrumen, bukan tujuan. Pasar sangat baik untuk mengorganisasi produksi dan distribusi banyak barang, tetapi tidak memadai untuk menentukan sendiri apa yang adil, apa yang layak, dan apa yang harus dilindungi dari logika komersial. Nilai tukar tidak sama dengan nilai manusia.

Negara: Penjaga Kepentingan Umum, tetapi Juga Rentan Gagal

Jika pasar tidak cukup, apakah negara adalah jawabannya? Ya, tetapi dengan syarat. Negara diperlukan karena hanya negara yang memiliki legitimasi dan kapasitas untuk menetapkan aturan main, menyediakan barang publik, memungut pajak, mendistribusikan kembali sumber daya, dan menjamin hak-hak dasar. Negara membangun jalan, sekolah, rumah sakit, sistem hukum, dan administrasi yang membuat pasar sendiri dapat bekerja. Dalam pengertian ini, pasar yang sehat justru bergantung pada negara yang efektif.

Namun negara bukan malaikat. Negara dapat gagal karena korupsi, patronase, inefisiensi birokrasi, penangkapan regulasi oleh oligarki, atau sentralisasi berlebihan. Ketika itu terjadi, intervensi negara tidak lagi memperluas martabat manusia, melainkan mempersempitnya. Karena itu,

membela peran negara tidak boleh berarti menutup mata terhadap risiko state failure.

Kita dapat melihat dua jenis kegagalan negara. Pertama, negara yang terlalu lemah. Ia tidak mampu menagih pajak secara adil, tidak memiliki data yang baik, tidak mampu menegakkan kontrak, dan tidak sanggup memberi perlindungan sosial kepada warga saat krisis. Akibatnya, warga diserahkan begitu saja kepada pasar, keluarga, atau amal. Kedua, negara yang terlalu predatorial. Ia hadir, tetapi terutama untuk mengontrol, mengekstrak, dan mengonsolidasikan kekuasaan. Dalam model ini, pembangunan menjadi proyek statistik dan simbolik, bukan proyek pembebasan manusia.

Karena itu, tantangan pembangunan bukan memperbesar atau memperkecil negara secara abstrak, melainkan membangun negara yang cakap, akuntabel, dan berorientasi publik. IMF dalam *Fiscal Monitor 2025* menggarisbawahi bahwa reformasi fiskal yang menyangkut subsidi energi dan pensiun hanya dapat berhasil bila ada dukungan publik; manfaat jangka panjangnya kerap tertutup oleh biaya jangka pendek yang terasa nyata. Pelajaran pentingnya ialah bahwa kebijakan ekonomi tidak pernah sekadar teknis; legitimasi sosial menentukan keberhasilannya. Negara tidak cukup benar di atas kertas. Ia harus dipercaya. ([IMF](#))

Negara yang berorientasi martabat manusia setidaknya memiliki lima fungsi. Pertama, menetapkan batas agar pasar tidak merusak fondasi sosial dan ekologis. Kedua, menjamin hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, identitas hukum, dan perlindungan sosial. Ketiga, melakukan investasi jangka panjang yang enggan dilakukan pasar, misalnya riset dasar, infrastruktur, dan transisi energi. Keempat, mendistribusikan peluang melalui sistem pajak dan belanja yang adil. Kelima, menjaga demokrasi agar kebijakan pembangunan tidak dikuasai oleh kepentingan sempit.

Dalam praktik, negara yang baik bukan yang mengerjakan semuanya sendiri, melainkan yang tahu kapan mengatur, kapan bermitra, kapan mengoreksi, dan kapan membiarkan masyarakat berinisiatif. Negara seperti ini bukan lawan pasar, melainkan arsitek ruang di mana pasar dapat berfungsi tanpa menggerus manusia.

Martabat Manusia sebagai Tujuan Akhir Pembangunan

Apa yang dimaksud dengan martabat manusia dalam pembangunan? Secara sederhana, martabat berarti setiap manusia memiliki nilai intrinsik yang tidak boleh direduksi pada utilitas ekonominya. Seorang anak tidak berharga karena kelak produktif; seorang lansia tidak kehilangan nilainya ketika tidak lagi bekerja; seorang penyandang disabilitas tidak boleh dipinggirkan karena tidak sesuai dengan logika efisiensi standar. Martabat adalah pengakuan bahwa manusia adalah tujuan, bukan alat.

Dalam pemikiran modern, gagasan ini mendapat artikulasi kuat dari John Rawls, Amartya Sen, dan Martha Nussbaum. Rawls menekankan bahwa masyarakat yang adil harus disusun sedemikian rupa sehingga kebebasan dasar dijamin, dan ketimpangan hanya dibenarkan bila menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung. Sen menggeser fokus pembangunan dari barang dan pendapatan menuju *capabilities*—kemampuan nyata manusia untuk menjalani hidup yang mereka nilai berharga. Nussbaum memperdalamnya dengan daftar kapabilitas inti yang harus dijamin agar manusia dapat hidup sepenuhnya sebagai manusia.

Perspektif ini sangat penting karena ia mengubah pertanyaan kebijakan. Bukan lagi sekadar “berapa tinggi pertumbuhan?”, tetapi “apakah orang dapat makan cukup, belajar bermutu, bekerja layak, bernapas di lingkungan sehat, memiliki waktu untuk merawat keluarga, berpartisipasi dalam masyarakat, dan hidup tanpa ketakutan ekstrem?” Dengan kerangka ini, pembangunan bukan akumulasi barang, melainkan pelebaran kebebasan substantif.

UNDP dalam *Human Development Report 2025* mengingatkan kembali inti human development: tujuan pembangunan adalah agar manusia dapat hidup dalam kehidupan yang mereka nilai dan punya alasan untuk menilainya. Dalam konteks AI sekalipun, laporan itu menekankan bahwa yang menentukan masa depan bukan sekadar apa yang dapat dilakukan teknologi, melainkan pilihan manusia tentang bagaimana membentuk ekonomi dan masyarakat. Ini sangat selaras dengan tesis makalah ini: pembangunan harus kembali dilihat sebagai pilihan moral dan politik, bukan semata proses teknokratis. ([Human Development Reports](#))

Gagasan martabat manusia juga penting karena dunia hari ini semakin mudah tergoda oleh penyederhanaan statistik. Pemerintah bangga pada pertumbuhan. Perusahaan bangga pada valuasi. Kota bangga pada investasi. Namun semua itu bisa berjalan berdampingan dengan kecemasan sosial, kualitas kerja yang menurun, polusi, biaya hidup yang menekan, dan memburuknya kohesi sosial. Angka makro penting, tetapi tidak cukup. Mereka harus tunduk pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah hidup manusia sungguh menjadi lebih baik?

Bayangkan seorang ibu rumah tangga di kawasan pesisir yang suaminya bekerja informal dan anak-anaknya bersekolah di fasilitas yang minim. Secara nasional, ekonomi mungkin tumbuh. Namun baginya, kenaikan harga pangan, banjir rob, dan absennya jaminan sosial membuat masa depan terasa makin sempit. Di titik ini, pembangunan yang berpusat pada martabat manusia akan bertanya bukan hanya apakah ekonomi bertumbuh, tetapi apakah keluarga itu menjadi lebih aman, lebih sehat, lebih berdaya, dan lebih punya harapan.

Mengapa GDP Saja Tidak Cukup

Salah satu sebab krisis orientasi pembangunan adalah dominasi GDP sebagai ukuran kemajuan. GDP berguna karena mengukur aktivitas ekonomi agregat. Ia penting bagi perencanaan makro, fiskal, dan moneter. Namun GDP tidak dirancang untuk mengukur keadilan, keamanan, kualitas

institusi, kesehatan mental, keberlanjutan ekologis, atau makna hidup. Ketika GDP dijadikan kompas utama, kebijakan mudah tergelincir ke dalam bias produksi: apa pun yang menambah output dianggap baik, sekalipun menggerus fondasi sosial.

Kritik ini bukan baru. Bahkan Simon Kuznets, salah satu tokoh awal pengukuran pendapatan nasional, telah mengingatkan bahwa kesejahteraan suatu bangsa tidak dapat disimpulkan dari ukuran pendapatan nasional semata. Kemudian, Sen, Stiglitz, dan banyak ekonom kelembagaan menegaskan hal serupa. Yang perlu diukur bukan hanya ukuran ekonomi, tetapi mutu distribusinya, keberlanjutannya, dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia.

Data mutakhir mendukung kritik ini. Bank Dunia menunjukkan bahwa sekalipun ada kemajuan pada kemiskinan ekstrem, jumlah orang yang hidup di bawah US\$6,85 per hari nyaris tidak berubah dalam 30 tahun terakhir. Ini berarti ada jurang antara pertumbuhan rata-rata dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan bagian bawah masyarakat. Laporan itu juga menekankan pentingnya peningkatan pendapatan tenaga kerja melalui penciptaan pekerjaan yang lebih baik serta investasi pada pendidikan, infrastruktur, dan layanan dasar. ([World Bank](#))

Laporan SDGs 2025 menegaskan hal serupa lewat indikator-indikator non-GDP: 272 juta anak dan pemuda masih di luar sekolah pada 2023; lebih dari 1,12 miliar orang hidup di permukiman kumuh atau informal tanpa layanan dasar; dan konflik telah mendorong populasi pengungsi global menjadi 37,8 juta pada pertengahan 2024, dengan lebih dari 120 juta orang terdorong paksa mengungsi pada akhir tahun itu. Semua ini tidak dapat dibaca hanya dari angka pertumbuhan.

Karena itu, pembangunan membutuhkan panel ukuran yang lebih kaya. Selain GDP, kita perlu indikator kemiskinan multidimensi, kualitas kerja, akses layanan dasar, perlindungan sosial, emisi, kualitas udara, keamanan pangan, kualitas pembelajaran, ketahanan iklim, dan kepercayaan

institusional. Negara yang pertumbuhannya tinggi tetapi kualitas manusianya rapuh sesungguhnya sedang menunda masalah, bukan menyelesaikannya.

Menata Ulang Relasi Pasar dan Negara

Menata ulang tujuan pembangunan dunia berarti menata ulang relasi pasar dan negara. Relasi itu tidak boleh lagi dipahami sebagai permainan zero-sum. Pasar yang inovatif membutuhkan negara yang kompeten. Negara yang efektif membutuhkan masyarakat sipil yang hidup dan pasar yang produktif. Yang harus dikoreksi adalah desain relasi mereka.

Pertama, pasar harus dibingkai oleh aturan yang melindungi manusia dan planet. Ini mencakup kebijakan persaingan, standar ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, tata kelola data, kewajiban lingkungan, dan perpajakan yang adil. Tanpa itu, efisiensi jangka pendek akan dibeli dengan kerusakan jangka panjang. Dalam era digital, misalnya, data pribadi, algoritme, dan infrastruktur platform tidak boleh dibiarkan berkembang hanya berdasarkan logika akumulasi. Mereka menyentuh hak, otonomi, dan kebebasan warga.

Kedua, negara harus beralih dari sekadar “penjaga malam” atau sekadar “mesin belanja” menjadi negara yang produktif dan strategis. Negara seperti ini mengidentifikasi sektor prioritas, membangun kapasitas manusia, memfasilitasi inovasi, dan mendorong upgrading dalam rantai nilai. Namun ia melakukannya dengan akuntabilitas dan evaluasi, bukan patronase. Dengan kata lain, industrial policy tidak boleh menjadi lisensi bagi rente; ia harus menjadi alat transformasi produktif.

Ketiga, pembangunan harus menempatkan perlindungan sosial sebagai fondasi, bukan residu. ILO melaporkan bahwa lebih dari separuh populasi dunia kini telah tercakup oleh setidaknya satu manfaat perlindungan sosial, tetapi 3,8 miliar orang masih sama sekali tidak terlindungi. Tanpa perlindungan sosial, rumah tangga miskin akan terus jatuh kembali ke

jurang setiap kali ada guncangan: sakit, kehilangan pekerjaan, panen gagal, banjir, atau krisis harga. Perlindungan sosial bukan beban anti-pertumbuhan; ia adalah prasyarat stabilitas, produktivitas, dan transisi yang adil. ([International Labour Organization](#))

Keempat, reformasi fiskal harus dilihat sebagai reformasi moral. Pajak bukan semata soal pemasukan negara; ia adalah instrumen untuk membiayai kepentingan umum dan mengoreksi ketimpangan daya. Belanja publik bukan sekadar pengeluaran; ia adalah pernyataan tentang siapa yang dinilai penting dalam masyarakat. Ketika anggaran terlalu besar tersedot untuk bunga utang atau subsidi yang regresif, negara kehilangan kemampuan untuk menegakkan martabat manusia secara konkret.

Kelima, pembiayaan pembangunan global harus direformasi. Laporan SDGs 2025 mencatat adanya kesenjangan pembiayaan SDG sebesar sekitar US\$4 triliun per tahun di negara berkembang, sementara bantuan pembangunan resmi turun 7,1 persen pada 2024 setelah lima tahun pertumbuhan. Dalam konteks ini, seruan UNCTAD untuk menata ulang arsitektur keuangan internasional menjadi sangat masuk akal. Selama biaya modal negara berkembang jauh lebih tinggi daripada negara maju, pembangunan dunia akan terus berat sebelah.

Pekerjaan Layak sebagai Jembatan antara Pasar dan Martabat

Di antara seluruh arena kebijakan, pasar tenaga kerja adalah titik temu paling nyata antara pasar, negara, dan martabat manusia. Di sinilah pembangunan dirasakan secara sehari-hari. Bagi banyak orang, martabat bukan konsep abstrak; ia berarti punya pekerjaan yang stabil, upah yang cukup, waktu istirahat, jaminan sosial, dan perlakuan hormat.

Karena itu, tujuan pembangunan tidak cukup berupa penciptaan kerja; yang dibutuhkan adalah penciptaan pekerjaan layak. Pekerjaan layak menyatukan empat unsur: pendapatan memadai, keamanan kerja,

perlindungan sosial, dan suara pekerja. Tanpa keempatnya, pasar tenaga kerja mudah menghasilkan pertumbuhan yang rapuh.

Data global mengingatkan kita akan urgensinya. ILO menyoroti bahwa kerja informal dan working poverty telah kembali ke level pra-pandemi di banyak negara, sementara pengangguran kaum muda tetap tinggi. SDG Report 2025 juga menunjukkan 57,8 persen pekerja dunia masih bekerja secara informal pada 2024. Bila lebih dari separuh pekerja global berada di sektor yang cenderung tanpa perlindungan penuh, maka dunia tidak bisa puas hanya dengan statistik pengangguran yang rendah. ([Research Repository](#))

Dalam konteks negara berkembang, masalah ini sering diperumit oleh dualisme ekonomi. Sektor modern tumbuh, tetapi tidak menyerap tenaga kerja cukup besar. Sektor informal menjadi penyangga, tetapi produktivitas dan perlindungannya rendah. Akibatnya, banyak rumah tangga hidup dalam wilayah abu-abu: tidak sangat miskin menurut statistik, tetapi sangat rentan terhadap guncangan.

Sebuah ilustrasi dapat menjelaskan hal ini. Seorang pekerja muda di kota mungkin memiliki pendapatan dari dua atau tiga aplikasi digital, sesekali mengambil kerja lepas daring, dan kadang dibantu keluarga. Secara statistik ia "bekerja". Namun ia tidak tahu berapa pendapatannya bulan depan, tidak punya jaminan pensiun, dan tidak memiliki perlindungan saat sakit. Pembangunan yang bermartabat tidak boleh berhenti pada label "terserap kerja". Ia harus bertanya tentang kualitas dan ketahanan kehidupan kerja.

Maka kebijakan pembangunan perlu mengintegrasikan strategi produktivitas dengan strategi proteksi. Pendidikan dan pelatihan harus selaras dengan transformasi industri. Upah minimum harus dirancang dengan hati-hati. Asuransi sosial perlu diperluas ke pekerja non-standar. Data ketenagakerjaan harus ditingkatkan agar pekerja informal dan platform tidak tak terlihat dalam kebijakan.

Perlindungan Sosial Bukan Residual, Melainkan Infrastruktur Peradaban

Selama bertahun-tahun, perlindungan sosial sering dipandang sebagai pengeluaran kompensatoris setelah pertumbuhan terjadi. Cara pandang ini keliru. Perlindungan sosial seharusnya dilihat sebagai infrastruktur peradaban: mekanisme yang membuat masyarakat mampu menanggung risiko tanpa menghancurkan masa depanarganya.

ILO menegaskan bahwa perlindungan sosial memiliki peran penting tidak hanya untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, tetapi juga untuk adaptasi iklim dan transisi yang adil. Lebih dari separuh populasi dunia memang telah dicakup oleh setidaknya satu manfaat perlindungan sosial, namun 3,8 miliar orang masih sama sekali tidak terlindungi. Ketika bencana iklim, sakit, PHK, atau guncangan harga datang, kelompok inilah yang pertama kali terjun bebas. ([International Labour Organization](#))

Secara ekonomi, perlindungan sosial berfungsi sebagai stabilizer. Secara sosial, ia memelihara kohesi. Secara moral, ia mengakui bahwa setiap manusia berhak atas tingkat keamanan minimum untuk menjalani hidup dengan harga diri. Program tunai, asuransi kesehatan, jaminan kehilangan pekerjaan, pensiun dasar, perlindungan anak, dan dukungan bagi difabel bukanlah “kemewahan” negara kaya; mereka adalah syarat dasar masyarakat yang beradab.

Dalam konteks transisi hijau, perlindungan sosial bahkan menjadi semakin penting. Reformasi energi, penyesuaian harga karbon, atau pergeseran menuju ekonomi rendah emisi dapat menimbulkan korban jangka pendek: pekerjaan hilang, biaya hidup naik, dan sektor tertentu melemah. Tanpa jaring pengaman yang baik, kebijakan iklim akan ditolak publik. Dengan jaring pengaman yang baik, transisi dapat diterima sebagai langkah adil menuju masa depan bersama.

Krisis Utang dan Ketidakadilan Arsitektur Keuangan Global

Sulit membicarakan martabat manusia tanpa membicarakan utang. Di banyak negara berkembang, ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menyempit karena bunga dan pokok utang memakan porsi besar anggaran. Ini bukan sekadar soal salah kelola domestik, tetapi juga tentang struktur sistem keuangan global yang tidak simetris.

Bank Dunia melaporkan bahwa negara-negara berkembang membayar rekor US\$1,4 triliun untuk melayani utang luar negeri pada 2023, dengan biaya bunga mencapai US\$406 miliar. UNCTAD menambahkan bahwa negara berkembang meminjam pada tingkat bunga dua sampai empat kali lebih tinggi daripada Amerika Serikat dan enam sampai dua belas kali lebih tinggi daripada Jerman. Ketika biaya modal saja sudah begitu timpang, pembangunan menjadi lomba yang aturannya tidak adil sejak awal. ([World Bank](#))

Masalahnya bukan bahwa utang selalu buruk. Utang bisa produktif bila membiayai investasi yang memperbesar kapasitas masa depan.

Masalahnya muncul ketika struktur pembiayaan global membuat negara berkembang membayar mahal untuk bertahan, sementara guncangan eksternal—suku bunga global, volatilitas komoditas, krisis geopolitik—terjadi di luar kendali mereka.

Laporan-laporan resmi juga menunjukkan konsekuensi manusianya. UNDP dan UNCTAD mengingatkan bahwa miliaran orang hidup di negara-negara yang membelanjakan lebih banyak untuk bunga utang daripada untuk kesehatan atau pendidikan. Ini berarti ada anak yang kualitas sekolahnya menurun, ada ibu yang akses kesehatannya menipis, dan ada investasi infrastruktur dasar yang tertunda—bukan karena kebutuhan tidak ada, tetapi karena arsitektur keuangan global mengutamakan kewajiban pembayaran di atas pembangunan manusia. ([UNDP](#))

Karena itu, menata ulang tujuan pembangunan dunia juga mensyaratkan reformasi pembiayaan global: restrukturisasi utang yang lebih cepat dan adil, pembiayaan pembangunan jangka panjang yang murah, perluasan

peran bank pembangunan multilateral, reformasi perpajakan internasional, serta insentif untuk investasi hijau dan sosial. Bila tidak, negara-negara berkembang akan terus diminta berlari dengan beban yang lebih berat dari negara-negara maju.

Pembangunan Hijau yang Adil: Planet Tidak Boleh Dipertentangkan dengan Manusia

Dalam perdebatan pembangunan, sering muncul dikotomi palsu antara pertumbuhan dan lingkungan, seolah-olah kita harus memilih antara manusia dan planet. Dikotomi ini menyesatkan. Tanpa planet yang layak huni, martabat manusia juga runtuh. Namun transisi ekologis yang mengabaikan keadilan sosial pun dapat menimbulkan penolakan yang besar.

UNEP memperingatkan bahwa kesenjangan pembiayaan adaptasi masih sangat besar, sebesar US\$187–359 miliar per tahun, meskipun pembiayaan adaptasi publik internasional meningkat. Sementara itu, SDG Report 2025 mencatat bahwa 2024 adalah tahun terpanas yang pernah tercatat, dengan suhu 1,55°C di atas tingkat pra-industri. Ini menunjukkan bahwa krisis iklim bukan ancaman masa depan yang abstrak, melainkan realitas kini yang menggerus air, pangan, kesehatan, kota, dan mata pencaharian. ([UNEP - UN Environment Programme](#))

Pembangunan hijau yang adil berarti tiga hal. Pertama, negara dan pasar harus berinvestasi pada dekarbonisasi, energi bersih, kota tangguh, pertanian adaptif, dan infrastruktur air. Kedua, biaya transisi tidak boleh dibebankan secara regresif kepada kelompok rentan. Ketiga, komunitas yang terdampak harus dilibatkan, bukan sekadar menjadi objek kebijakan.

Bayangkan seorang petani kecil yang bergantung pada curah hujan yang kini tidak menentu. Baginya, perubahan iklim bukan jargon konferensi internasional. Ia hadir sebagai gagal panen, pendapatan yang anjlok, dan utang rumah tangga. Pembangunan yang bermartabat akan memastikan

bahwa kebijakan iklim tidak berhenti pada target emisi, tetapi juga menyediakan asuransi gagal panen, akses air, benih tahan iklim, pembiayaan murah, dan pasar yang adil.

Dengan kata lain, agenda hijau harus dipadukan dengan agenda sosial. Bukan *green at any cost*, melainkan *green with justice*.

Peran Teknologi dan AI: Memperluas atau Mempersempit Martabat?

Dunia kini memasuki fase di mana AI dan digitalisasi semakin menentukan arah produktivitas, administrasi publik, dan organisasi sosial. Dalam bahasa pembangunan, teknologi dapat menjadi pengungkit besar. Ia dapat memperluas akses pendidikan, mempercepat layanan publik, memperbaiki diagnosis medis, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Namun ia juga bisa memperbesar pengawasan, monopoli, manipulasi informasi, dan penggantian kerja tanpa perlindungan.

UNDP dalam *Human Development Report 2025* menekankan bahwa pertanyaan utamanya bukan apakah AI semakin canggih, melainkan pilihan-pilihan manusia dalam membentuk lembaga ekonomi dan sosial di sekitarnya. Ini merupakan peringatan penting. Teknologi tidak netral dalam akibatnya. Ia netral hanya pada tingkat alat; pada tingkat sistem, ia selalu dibingkai oleh kekuasaan, regulasi, distribusi akses, dan tujuan sosial.

[\(Human Development Reports\)](#)

Karena itu, pembangunan yang berpusat pada martabat manusia harus menghindari dua jebakan. Jebakan pertama adalah romantisme teknologi: mengira inovasi dengan sendirinya akan menyelesaikan ketimpangan. Jebakan kedua adalah fobia teknologi: menolak inovasi hanya karena risikonya. Posisi yang lebih bijak adalah tata kelola teknologi yang pro-manusia.

Ini berarti negara harus mengembangkan kapasitas digital publik, regulasi data, kebijakan persaingan digital, dan sistem pendidikan yang menyiapkan pekerja menghadapi perubahan. Pasar harus didorong untuk

berinovasi, tetapi dalam kerangka transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Di atas semua itu, manusia tidak boleh diturunkan menjadi "input" yang sekadar menyesuaikan diri pada mesin; justru teknologi harus diatur agar memperluas kapabilitas manusia.

Menuju Arsitektur Baru Pembangunan Dunia

Dari seluruh pembahasan di atas, dapat dirumuskan beberapa pilar bagi arsitektur baru pembangunan dunia.

Pertama, **tujuan pembangunan harus dirumuskan ulang** sebagai perluasan kapabilitas manusia dalam batas-batas ekologis planet. Ini berarti indikator keberhasilan harus melampaui GDP dan mencakup kualitas kerja, pembelajaran, kesehatan, akses dasar, ketahanan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Kedua, **pasar harus dikembalikan ke fungsi instrumentalisnya**. Ia adalah sarana koordinasi ekonomi yang kuat, tetapi tidak boleh menjadi penentu tunggal nilai sosial. Barang-barang tertentu—pendidikan dasar, kesehatan primer, udara bersih, air, identitas hukum, keamanan sosial—harus diperlakukan sebagai hak atau barang publik, bukan sekadar komoditas.

Ketiga, **negara harus dibangun sebagai institusi publik yang cakap dan dapat dipercaya**. Kapasitas pajak, kualitas birokrasi, integritas hukum, dan kemampuan eksekusi menjadi sangat penting. Negara yang lemah gagal melindungi warga; negara yang tak akuntabel gagal menghormati warga.

Keempat, **perlindungan sosial universal bertahap** harus menjadi prioritas. Dalam dunia yang semakin rawan guncangan—pandemi, iklim, perang, otomatisasi—keamanan minimum bukan tambahan, melainkan syarat stabilitas dan kebebasan substantif.

Kelima, **sistem keuangan global perlu diperbaiki** agar tidak memerangkap negara berkembang dalam spiral utang mahal dan ruang fiskal sempit. Tanpa pembiayaan yang lebih adil, semua seruan tentang pembangunan inklusif akan terdengar normatif tetapi tak operasional.

Keenam, **transisi hijau harus menjadi transisi yang adil**. Pembiayaan adaptasi, perlindungan pekerja, dan investasi pada komunitas rentan harus menyertai target iklim.

Ketujuh, **tata kelola teknologi harus berpusat pada manusia**. AI, platform digital, dan data harus diarahkan untuk memperluas kapabilitas, bukan memperdalam subordinasi.

Implikasi bagi Negara-Negara Berkembang dan Indonesia

Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menata ulang tujuan pembangunan berarti menghindari dua jebakan sekaligus: pertumbuhan yang elitis dan redistribusi yang tidak produktif. Yang dibutuhkan adalah sintesis: pertumbuhan yang menciptakan kapasitas produktif nasional, sekaligus distribusi yang memperluas kesempatan dan perlindungan.

Dalam praktik, ini berarti industrialisasi dan hilirisasi harus dikaitkan dengan penciptaan pekerjaan layak, transfer teknologi, dan penguatan UMKM; bukan sekadar peningkatan ekspor bahan setengah jadi. Sistem pendidikan harus diarahkan pada mutu, bukan sekadar partisipasi. Reformasi fiskal harus memperbesar ruang untuk kesehatan, nutrisi, pendidikan, riset, dan perlindungan sosial. Kota harus dirancang bukan hanya untuk investasi, tetapi juga untuk perumahan layak, mobilitas manusiawi, dan ketahanan iklim.

Indonesia memiliki peluang besar karena memiliki pasar domestik besar, bonus demografi yang masih berlangsung, sumber daya alam strategis, dan posisi geopolitik penting. Namun peluang itu hanya akan bermakna bila dibingkai oleh visi pembangunan yang memuliakan manusia. Bila tidak, pertumbuhan dapat meningkat sambil rasa aman sosial tetap tipis, kualitas pekerjaan stagnan, dan kerusakan ekologis meningkat.

Pembangunan yang berpusat pada martabat manusia akan mendorong Indonesia dan negara berkembang lain untuk bertanya lebih jujur: apakah

kebijakan industri kita memperluas kelas menengah produktif? Apakah kebijakan digital kita melindungi pekerja dan data? Apakah belanja negara benar-benar memperkuat manusia dari bawah? Apakah transisi energi kita menyiapkan komunitas lokal? Apakah kemajuan statistik sungguh terasa sebagai kemajuan hidup?

Penutup

Dunia sedang berada pada persimpangan. Pertumbuhan masih penting, tetapi tidak cukup. Pasar masih diperlukan, tetapi tidak boleh didewakan. Negara tetap vital, tetapi harus dibersihkan dari kecenderungan predatoris dan diperkuat kapasitas publiknya. Di atas keduanya, harus ada kompas normatif yang lebih tinggi: martabat manusia.

Makalah ini menegaskan bahwa krisis pembangunan dunia pada dasarnya adalah krisis orientasi. Data mutakhir tentang kemiskinan, ketenagakerjaan informal, perlindungan sosial, utang, pembiayaan SDG, dan krisis iklim menunjukkan bahwa sistem global saat ini belum berhasil menyelaraskan efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Pasar menghasilkan dinamika, negara menyediakan koreksi dan fondasi publik, tetapi tanpa tujuan etis yang benar, keduanya dapat menjauh dari manusia yang seharusnya mereka layani. ([World Bank](#))

Karena itu, menata ulang tujuan pembangunan dunia berarti menggeser pusat gravitasi pembangunan: dari akumulasi menuju kapabilitas, dari pertumbuhan semata menuju kesejahteraan yang adil, dari efisiensi sempit menuju martabat yang nyata. Dunia tidak membutuhkan lebih sedikit pasar atau lebih banyak negara secara abstrak; dunia membutuhkan pasar yang dibatasi oleh keadilan, negara yang dibatasi oleh akuntabilitas, dan keduanya diarahkan oleh penghormatan pada manusia.

Akhirnya, peradaban akan dinilai bukan terutama dari seberapa besar kekayaan yang dihasilkannya, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan yang lemah, bagaimana ia membagi risiko, bagaimana ia menjaga bumi,

dan bagaimana ia memastikan bahwa setiap orang memiliki peluang nyata untuk hidup layak. Di situlah pembangunan menemukan makna terdalamnya.

Glosarium

Adaptasi iklim: Penyesuaian sistem sosial, ekonomi, dan ekologis terhadap dampak perubahan iklim agar kerugian dapat dikurangi dan ketahanan diperkuat.

Capability/kapabilitas: Kemampuan nyata seseorang untuk melakukan atau menjadi sesuatu yang bernilai dalam hidupnya, menurut pendekatan Amartya Sen dan Martha Nussbaum.

Eksternalitas: Dampak samping dari aktivitas ekonomi yang tidak tercermin dalam harga pasar, misalnya polusi atau kemacetan.

Good jobs/pekerjaan layak: Pekerjaan yang memberi upah memadai, kondisi kerja aman, perlindungan sosial, dan ruang partisipasi pekerja.

Human development/pembangunan manusia: Pendekatan pembangunan yang menekankan perluasan kebebasan dan pilihan manusia untuk hidup bernilai.

Informalitas: Kondisi kerja atau usaha yang tidak sepenuhnya tercakup oleh regulasi, kontrak formal, dan sistem perlindungan sosial.

Martabat manusia: Nilai intrinsik setiap manusia yang membuatnya tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat produksi atau objek kebijakan.

Market failure/kegagalan pasar: Situasi ketika mekanisme pasar tidak menghasilkan alokasi yang efisien atau adil, misalnya karena monopoli, informasi asimetris, atau eksternalitas.

Perlindungan sosial: Kebijakan dan program untuk melindungi individu dan rumah tangga dari risiko seperti sakit, pengangguran, disabilitas, usia tua, atau kemiskinan.

Pembangunan berkelanjutan: Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya.

Redistribusi: Pengalihan sumber daya melalui pajak, transfer, atau layanan publik untuk mengurangi ketimpangan dan memperluas kesempatan.

SDGs: Sustainable Development Goals, yaitu 17 tujuan pembangunan berkelanjutan global yang ditargetkan untuk dicapai pada 2030.

State failure/kegagalan negara: Ketidakmampuan negara menjalankan fungsi publik secara efektif, adil, atau akuntabel.

Transisi yang adil: Peralihan menuju ekonomi hijau yang memastikan pekerja dan kelompok rentan tidak menanggung beban secara tidak proporsional.

Referensi (APA 7)

International Labour Organization. (2025). *World employment and social outlook: Trends 2025*.

International Labour Organization. (2024). *World social protection report 2024–26: Universal social protection for climate action and a just transition*.

International Monetary Fund. (2025). *World economic outlook, April 2025: A critical juncture amid policy shifts*.

International Monetary Fund. (2025). *Fiscal monitor, April 2025: Fiscal policy under uncertainty*.

Mazzucato, M. (2018). *The value of everything: Making and taking in the global economy*. PublicAffairs.

Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Belknap Press.

Polanyi, K. (2001). *The great transformation: The political and economic origins of our time*. Beacon Press. (Original work published 1944)

Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.

Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. W. W. Norton.

Sandel, M. J. (2020). *The tyranny of merit: What's become of the common good?* Farrar, Straus and Giroux.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.

Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality*. W. W. Norton.

United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *Trade and development report 2024: Rethinking development in the age of discontent*.

United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *A world of debt 2024: A growing burden to global prosperity*.

United Nations Development Programme. (2025). *Human development report 2025: A matter of choice: People and possibilities in the age of AI*.

United Nations Environment Programme. (2024). *Adaptation gap report 2024*.

United Nations Statistics Division. (2025). *The sustainable development goals report 2025*.

World Bank. (2024). *Poverty, prosperity, and planet report 2024*.

*Rudy C Tarumingkeng: Pasar, Negara, dan Martabat Manusia:
Menata Ulang Tujuan Pembangunan Dunia*

World Bank. (2024). *International debt report 2024*.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 13 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69dc695f-7cd8-83a1-b386-2bca9314b18e>